

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, T. Y. (2024). *The Criminal Acts of Corruption as Extraordinary Crimes in Indonesia Abstract* : 17–27.
- Alia, R. N. (2023). *Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2021*. 1(2).
- AMIN, M. N. (2020). *TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI BATEGULUNG KEC. BONTONOMPO KAB. GOWA (Putusan PN Makassar No.76 /Pid.Sus-TPK/ 2019/PN.Mks)*. 76.
- Andari, R. N. (2018). (*DANA DESA*) *DI INDONESIA MASA REFORMASI 1999-2015 APBN / Dana Desa) FUND) IN INDONESIA IN THE REFORMATION ERA 1999-2015 / Village Fund)*. 1(1), 12–26.
- Anrikhotama, M. R. V. (2025). *ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA OLEH KEJAKSAAN (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Tanggamus)*.
- Ayu, I., Widiati, P., Hukum, F., & Warmadewa, U. (2023). *KEDUDUKAN DAN HIERARKI PERATURAN DESA DALAM PERATURAN PER-UNDANG-UNDANGAN*. 4(2), 202–206.
- Badrus Zaman, D. N. (2020). *PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCEDALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri)*. 0342.
- Barao, J. (2019). *PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI*. VIII(9), 61–68.
- Baehaqi, E. S. (2012). *KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA*.
- Afrizal, T. Y. (2024). *The Criminal Acts of Corruption as Extraordinary Crimes in Indonesia Abstract* : 17–27.
- Alia, R. N. (2023). *Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2021*. 1(2).
- AMIN, M. N. (2020). *TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI BATEGULUNG KEC. BONTONOMPO KAB. GOWA (Putusan PN Makassar No.76 /Pid.Sus-TPK/ 2019/PN.Mks)*. 76.
- Andari, R. N. (2018). (*DANA DESA*) *DI INDONESIA MASA REFORMASI*

1999-2015 APBN / Dana Desa) FUND) IN INDONESIA IN THE REFORMATION ERA 1999-2015 / Village Fund). 1(1), 12–26.

Anrikhotama, M. R. V. (2025). *ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA OLEH KEJAKSAAN (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Tanggamus).*

Ayu, I., Widiati, P., Hukum, F., & Warmadewa, U. (2023). *KEDUDUKAN DAN HIERARKI PERATURAN DESA DALAM PERATURAN PER-UNDANG-UNDANGAN. 4(2), 202–206.*

Badrus Zaman, D. N. (2020). *PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri). 0342.*

Barao, J. (2019). *PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. VIII(9), 61–68.*

Bisnis, J., Rae, M. V., Malut, M. G., Timuneno, A. Y. W., & Akun, S. (2022). *Dana Desa sebagai alat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Jurnal Bisnis, Ekonomi, dan Sains. 2(2), 346–363.*

Dede Kusno Adi, Hernawati RAS, Y. K. (2024). *Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Dana Desa. 6(1), 9–18.*

Dinata, K., Nuraeny, & Supriatna, D. (2024). *PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM HAK ASASI MANUSIA. 3, 13124–13146.*

Efendi, A. (2019). *INTERPRETASI MODERN MAKNA MENYALAHGUNAKAN A MODERN INTERPRETATION OVER.*

Fauziyyah, N. J. (2025). *ANALISIS KRIMINOLOGI KEJAHATAN KORUPSI DANA DESA OLEH PERANGKAT DESA (STUDI DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN TULANG BAWANG).*

Ghannesdeva Nadia Yossita, Mas Rara Tri Retno Herryani, H. (2014). *LAW*

*NUMBER 6 YEAR 2014 ABOUT VILLAGE REGULATION AS A LEX
SPECIALIST IN INDONESIAN NATIONAL LAW POLITICS. 6.*

- Hafrida. (2012). *Analisis Penerapan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Pada Perkara Nomor 01/Pid.B/Tpk/2012/Pn. Jbi.* 32–45.
- Haga, S. L., & Adhari, A. (2026). *Penghapusan Unsur Merugikan Keuangan Negara : Sinkronisasi Undang-Undang Tipikor dengan UNCAC.* 5, 313–326.
- Hamdan, M., & Bilyan, K. (2024). *Dinamika Hukum Pemerintahan Desa : Tinjauan Terhadap UU No . 6 Tahun 2014 Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo.* 6468(6), 318–331.
- Hani, M. R., & Noor, M. (2024). *MEKANISME PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PERSFEKTIF OPEN GOVERNMENT.* 7, 1631–1646.
- Harahap, M. S. (2014). *PERBEDAAN KONSEPSI RECHTSTAAT DAN THE RULE OF LAW.* 4(2), 57–63.
- Hendrawan, D. (2019). *Analisis unsur subjektif sebagai elemen pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi.* 3(2), 153–169.
- Indonesia, R. (1999). *Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*
- Indonesia, R. (2014). *UU NO 6 TAHUN 2014.*
- Irma Antika Putri, Sherli Oktafia Dewi, Moh Alfin Naf'an, Raihan Rifqi Permana, W. P. S. (2024). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA.* 2(11).
- Kumalaningdyah, N. (2020). *Pertentangan Antara Diskresi Kebijakan Dengan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi.* 481–498.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art3>
- Lainsamputty, N. (2025). *REKONSTRUKSI KEWENANGAN ASAL-USUL ATAS KELEMBAGAAN, PENGISIAN JABATAN, DAN MASA JABATAN KEPALA*

- DESA ADAT. 11*, 375–394. <https://doi.org/10.25123/vej.v11i2.9414>
- Lavenia, M., & Hidayat, M. T. (2025). *ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA SIRAPAN. 10*(204), 2217–2227.
- Lolong, S. N. (2015). *TINDAK PIDANA KORPORASI DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31/1999 Jo UU NO. 20/2001. III*(1), 124–133.
- Lubis, Z., & Saptomo, A. (2024). *The Impact and Efforts to Eradicate Corruption Crimes in Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.25-5-2024.2349487>
- Makhfud, Kristina Sulastri, Y. I. (2024). *URGENSI ASAS KELEMBAGAAN ATAU PEJABAT PEMBENTUK YANG TEPAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA. 6*(1), 86–95.
- Mamesah, C. N. A., Mokorimban, M. A. T., & Turangan, D. D. (2025). *KAJIAN HUKUM TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA TONDEGESAN. 13*(3).
- Marsuki, I., Mappilawa, H. M. I., & Faisal, A. (2020). *FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDAN PENGANIAYAAN BERAT YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR. 02*(1), 728–744.
- Meidiantama, R., & Charinda, D. E. (2024). *Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembaharuan KUHP Nasional (Comparison of Corruption Crime Regulations in the Reform of the National Criminal Code). 3*(1), 15–24.
- Moeljatno, A. P., Roos, T. D. E., & Haenen, D. A. N. I. (2022). *ANALISIS PEMIKIRAN MOELJATNO, SUDARTO, THEO DE ROOS, DAN IRIS HAENEN. 8*, 415–443. <https://doi.org/10.25123/vej.v8i2.4923>
- Muh Ali Hasbi, Ruslan Renggong, M. N. (2024). *ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA DI*

- KABUPATEN SINJAI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 39/PID.SUS-TPK/2020/PN.MKS). 6(2), 313–317. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i2.4480>*
- Mujiyanto, Djamarel Hermanto, L. Y. P. (2023). *EFEKTIVITAS DANA DESA DILIHAT DARI TUJUAN PROGRAM. 2(2), 173–178.*
- Muksin, A., Runtu, T., & Datu, C. V. (2023). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan*
Transparency And Accoutability Of The Village Government In Managing Village Fund Allocations In Ar. 6(2), 1281–1296.
- MULYADI, L. (2003). *Asas pembalikan beban pembuktian terhadap tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana indonesia dihubungkan dengan konvensi perserikatan bangsa- bangsa anti korupsi 2003 1. September 2007, 1–26.*
- Mulyani, S., dan Prasajo, E. (2023). *Transparansi dan partisipasi masyarakat dalam mengawal dana desa menuju masyarakat desa sejahtera. 96–101.*
- Murliasari, R. (2021). *Implementation of Village Fund Management Policy Affirmation in Village Development. 13, 555–567.*
- Musafir, M. D. R. S. M. (2024). *TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA(ANALISIS KEWENANGAN KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI). 6(1), 1–13.*
- Nahuddin, Y. E. (2018). *Akuntabilitas Keuangan Desa dan Kesejahteraan Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. 107–116.*
- Najmuddin, M. N. (2024). *TINJAUAN YURIDIS KERUGIAN KEUANGAN*
JURIDICAL REVIEW OF FINANCIAL LOSSES STATE AS A RESULT OF. 13(1), 52–61. <https://doi.org/10.32492/jj.v13i1.13106>
- Novitasari, E. A., Pravasanti, Y. A., & Ma, M. H. (2024). *Pengaruh Pendapatan*

Asli Desa , Dana Desa , Bagi Hasil Pajak Retribusi Terhadap Belanja Desa (Studi Empiris di Desa Se- Kecamatan Delanggu Tahun 2018-2022) Sitasi Artikel : 3(2), 497–504.

Nuraini, M., & Abdullah, M. A. F. (2024). *ANALISIS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA*. 2, 80–88.

Nurfaidah, M. (2025). *Pengawasan Dana Desa dalam Upaya Pencegahan Korupsi*. 1(2), 67–76.

Permatasari, I., & Hasmi, N. (2024). *DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DS.BONTOMANAI KEC.BAJENGBARAT KAB.GOWA*.

Pinem, S., Yusrizal, M., & Syaputra, A. (2023). *DINAMIKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI*. 87–94.

Pratiwi, W., Olyvia, J., Efridadewi, A., & Widiyani, H. (2024). *Problematisa Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi: Pasal 2 dan 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999*. 10(13), 776–786.

Prianto, W. (2024). *ANALISIS HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN TEORI NORMA HUKUM OLEH HANS Kelsen DAN HANS Nawiasky*. 2(1), 8–20.

Prihanto, D. (2020). *ANALISIS BANTUAN KEUANGAN PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENINGKATAN KETAHANAN MASYARAKAT DESA (PKMD) DI KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020*. 62–70.

Purukan, A. H. (2017). *PEMBUKTIAN SIFAT MELAWAN HUKUM MENURUT PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI*. VI(2).

- Ratih Rahayu, Faizal Anwar, Kazman, T. D. (2023). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa sistem pengelolaan*. 5(April), 117–129.
- Reformasi, D. A. N., & Republik, B. (2019). *Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Reksohadiprodjo, S. (1996). *Keuangan Negara (Ekonomi Publik): Teori dan Praktek*.
- RI, K. K. (2013). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*.
- Sahlan, M. (2016). *Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi Mohammad Sahlan*. 271–293.
- Sakti, L. (2025). *Implikasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan terhadap Eksistensi Peraturan Desa*. 6(1), 133–140.
- Sangapan, L. H., Manurung, C., Manurung, R., & Manurung, A. (2025). *Penegakan Hukum Korupsi di Indonesia : Perspektif Systematic Literature Review (2010 – 2023)*. 1(1), 9–17.
- Saragih, Y. M. (2017). *PROBLEMATIKA GRATIFIKASI DALAM SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISISUNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JOUNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANGPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI*. 5(5), 76–86.
- Saraswati, R. (2013). *PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN*. 2(12), 97–103.
- Setiawan, M. N., & Saleh, K. (2021). *Peluang Dan Tantangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Bidang Pengelolaan Dana Desa di Indonesia*. 57–68.

- Setyaningrum, A., Dewi, M. W., & Kusuma, I. L. (2024). *Pengaruh Akuntabilitas , Transparansi , dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance* Sitasi Artikel : 3(3), 581–589.
- Sihombing, A., & Nuraeni, Y. (2025). *Unraveling The Tangled Threads in The Handling of Corruption Crime & Its Impact on The Effectiveness of The Criminal Justice System in Indonesia*. 12(4), 1231–1246.
- Sirait, R. (2024). *Politik Hukum Kedudukan KPK sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. 3(1).
- Sri Wahyuni, E. M. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman*. 4(2), 51–58.
- Suastini, N. M. (2019). *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial EFEKTIVITAS DANA BANTUAN HIBAH TERHADAP KUALITAS DEMOKRASI DAN PARTISIPASI POLITIK : Kasus Desa Adat Bualu , Kecamatan Kuta Selatan , Kabupaten Badung*. 3(1), 67–79.
- Sufitrayati. (2020). *Literature Study: Keuangan Desa*.
- Suliyatini, M., Dewata, E., & Satriawan, I. (2025). *Transparansi , Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Desa*. 4(1), 1–6.
- Sutarna, I. T., & Subandi, A. (2023). *Korupsi Dana Desa Dalam Perspektif Principal-Agent*. 04(02), 121–135.
- Suyikati. (2025). *Implikasi Korupsi Terhadap Pembangunan Sosial- Ekonomi Dan Upaya Pemulihan Keperdataan Di Indonesia*. 6(1), 452–469.
- Taufiqi, D., & Ariani, K. R. (2022). *The Effect of Good Governance, Accountability, and Transparency of Village Funds on Public Trust*. 0672(c), 184–191.
- Trie, N., & Dewi, A. (2025). *Peran KPK Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. 2(April), 63–69.
- Trisia, S. (2024). *Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* 3.

Utomo, B. (2024). *Criminological Approaches to State Financial Recovery in Cases of Village Fund Corruption*. 1(2), 15–20.

Wibowo, A. (2020). *PENENTUAN KRITERIA UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI*. 7(1), 120–148.

Wibowo, A. R. I. (2025). *Analisis hukum terhadap sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik dalam tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan*.

Wiraguna, S. A. (2024). *Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif di Indonesia*. 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>

Wulandari, A. I., & Sekarsari, R. W. (2025). *Peranan Alokasi Dana Desa (ADD) Meningkatkan Pengembangan Desa dalam*.

Yani, S. L. (2023). *Alokasi Dana Desa dalam Mendukung Kebijakan Desa di Kabupaten Sidoarjo*. 1, 79–88.

Yustika Mahdania, Aminuddin Ilmar, A. M. M. (2022). *AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI*. 142–153.

Yusuf, D. (2019). *KORUPSI dan PENINDAKANNYA*.

Zainal, A. (2016). *PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN*. 1–18.

Zuliah, A., & Amalia, F. (2025). *PENERAPAN ADAGIUM LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALISS DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA*. V, 124–135.

https://surabaya.kompas.com/read/2025/06/10/202350178/korupsi-pembangunan-kolam-renang-rugikan-negara-rp-1-miliar-mantan-kades-di?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=AIML_Widget_Desktop

<https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7679365/korupsi-dana-desa-kades-crabak-ponorogo-ditahan-kejari?utm>

<https://beritatrends.co.id/mantan-kades-ngariboyo-divonis-4-tahun-6-bulan-penjara-berikut-penjelasan-kejari-magetan/?utm>

